

BAB II
BAGIAN HUMAS SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Pada bab ini, peneliti akan menjelaskan gambaran umum tugas dan fungsi Bagian Humas Setjen DPR RI. Peneliti berharap pembaca dapat mengetahui keterkaitan antara tugas serta fungsi Bagian Humas Setjen DPR RI dalam memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat. Data dalam bab ini diperoleh melalui data sekunder yakni Peraturan Sekretaris Jendral Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 6 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan berdasarkan pengamatan peneliti selama Kuliah Kerja Praktik di Humas Setjen DPR RI.

2.1 Sekretariat Jendral Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Sekretariat Jendral Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia merupakan aparatur pemerintah yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Sekretariat Jendral DPR RI merupakan unsur penunjang DPR, yang berkedudukan sebagai Kesekretariatan Lembaga Negara yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jendral dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pimpinan DPR. Sekretaris Jendral dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris

Jenderal dan beberapa Deputi Sekretaris Jenderal yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Pimpinan DPR. DPR dapat mengangkat sejumlah pakar/ahli sesuai dengan kebutuhan, dan dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Jenderal dapat membentuk Tim Asistensi. Susunan organisasi dan tata kerja Sekretaris Jenderal ditetapkan dengan keputusan Presiden.

2.1.1 Kedudukan, Visi dan Misi Sekretariat Jenderal DPR RI

a) Kedudukan Sekretariat Jenderal DPR RI

Sebagai unsur penunjang DPR yang berkedudukan sebagai Kesekretariatan Lembaga Negara.

b) Visi Sekretariat Jenderal DPR RI

Menjadikan Sekretariat Jenderal yang profesional dan akuntabel.

c) Misi Sekretariat Jenderal DPR RI

- Mewujudkan penyelenggaraan fungsi legislasi yang efisien dan efektif
- Mewujudkan penyelenggaraan fungsi penganggaran negara yang akuntabel dan transparan
- Mewujudkan penyelenggaraan fungsi pengawasan yang transparan dan efektif
- Mewujudkan kelembagaan DPR RI yang kuat, aspiratif, responsif dan akomodatif⁷

⁷ Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 6 tahun 2015 BAB II Pasal 2 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan

2.1.2 Biro Pemberitaan Parlemen

Biro Pemberitaan Parlemen mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan pemberitaan, pelayanan informasi, kehumasan, pengelolaan televisi dan radio, serta pengelolaan urusan penerbitan. Dalam melaksanakan tugasnya, Biro pemberitaan Parlemen menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan dan evaluasi rencana strategis Biro Pemberitaan Parlemen;
2. Perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Biro Pemberitaan Parlemen;
3. Perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Biro Pemberitaan Parlemen;
4. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Biro Pemberitaan Parlemen;
5. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemberitaan, pelayanan informasi, kehumasan, televisi dan radio parlemen, dan penerbitan;
6. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberitaan, pelayanan informasi, kehumasan, televisi dan radio parlemen, dan penerbitan;
7. Penyelenggaraan pemberitaan di media cetak, media sosial, dan *website*;
8. Penyelenggaraan hubungan masyarakat;
9. Penyelenggaraan televisi dan radio;
10. Penyelenggaraan urusan penerbitan;
11. Penyelenggaraan kehumasan;
12. Pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Deputi Bidang Persidangan;

13. Penyusunan laporan kinerja Biro Pemberitaan Parlemen;
14. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Deputi Bidang Persidangan.

Biro Pemberitaan Parlemen terdiri atas:

- Bagian Media Cetak dan Media Sosial, mempunyai tugas mengelola pemberitaan di ⁸media cetak, media sosial, dan *website*, serta melaksanakan analisis media.
- Bagian Hubungan Masyarakat, melaksanakan penerangan kepada masyarakat dan pelayanan informasi publik.
- Bagian televisi dan Radio Parlemen, Mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan televisi dan radio.
- Bagian Penerbitan, mempunyai tugas melaksanakan urusan penerbitan produk Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal, dan badan Keahlian.

2.1.3 Bagian Hubungan Masyarakat

Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penerangan kepada masyarakat dan pelayanan informasi publik. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239, Bagian Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran bagian Hubungan Masyarakat;

⁸ Peraturan Sekretaris Jendral Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 6 tahun 2015 BAB II Pasal 232 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

2. Penyusunan bahan kegiatan di bidang Hubungan Masyarakat;
3. Pelaksanaan kegiatan di bidang hubungan masyarakat;
4. Penyiapan bahan materi dan pelaksanaan penerangan tentang keparlemenan;
5. Pelayanan informasi publik;
6. Pelaksanaan kehumasan;
7. Pelaksanaan tata usaha Bagian Hubungan Masyarakat;
8. Pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro Pemberitaan Parlemen;⁹
9. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada kepala Biro Pemberitaan Parlemen

Bagian Hubungan Masyarakat terdiri atas:

- Subbagian penerangan, mempunyai tugas penyiapan bahan materi dan pelaksanaan penerangan kepada masyarakat mengenai Dewan perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- Subbagian pelayanan informasi publik, mempunyai tugas pemberian layanan informasi publik kepada masyarakat dan pelaksanaan tata usaha Bagian Hubungan Masyarakat.

⁹ Peraturan Sekretaris Jendral Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 6 tahun 2015 BAB II Pasal 239 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

2.2 Tugas dan Fungsi Humas Setjen DPR RI

Humas Setjen DPR RI memiliki dua tugas utama, yakni Subag Penerangan dan Subag Pelayanan Informasi Publik. Subag Penerangan bertugas untuk menerima kunjungan masyarakat. Masyarakat yang berkunjung untuk tujuan studi wisata dan masyarakat yang ingin mengambil foto kenangan di Gedung DPR akan diterima oleh Humas Subag Penerangan.

Kunjungan yang berupa studi wisata akan diterima di ruang Operation Room, Gedung Nusantara, dan akan diberi penjelasan mengenai Mekanisme Kerja Dewan Perwakilan Rakyat. Setelah acara di Operation Room selesai masyarakat akan dipandu untuk keliling gedung DPR RI (tour building) khususnya ke Museum DPR RI dan Ruang Sidang Paripurna. Selama melakukan tour building masyarakat diberikan penjelasan tentang sejarah DPR RI, sejarah gedung dan arti hiasan – hiasan atau ornamen yang terdapat pada gedung DPR RI. Masyarakat yang biasanya datang untuk melakukan studi wisata berasal dari sekolah dan perguruan tinggi (SD, SMP, SMA, Mahasiswa) dan instansi lain seperti kelompok karang taruna dan lain-lain. Adapun jadwal kunjungan masyarakat dari hari Senin sampai hari Kamis pada pukul 09.00 WIB hingga pukul 12.00 WIB.

Kemudian Subag Pelayanan Informasi Publik mempunyai tugas pemberian layanan informasi publik kepada masyarakat dan pelaksanaan tata usaha bagian Humas. Subag PIP biasa melakukan pelayanan melalui portal website DPR RI yakni portal.dpr.go.id juga masyarakat yang datang langsung ke Humas Setjen DPR RI

sebagai pengaju pemohon data. Adapun jenis data yang biasa diminta oleh masyarakat yakni Draft, Risalah, RUU dan UU. Humas Subag PIP mempunyai tata cara dan aturan dalam memberikan pelayanan data kepada masyarakat menggunakan Undang-undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Selain sebagai tugas utamanya di Sub Bagian Penerangan dan Sub Bagian Pelayanan Informasi Publik, Humas Setjen DPR RI setiap tahun selalu mengadakan event dan bazar di mana event tersebut yakni parlemen remaja dan parlemen kampus, mengadakan simulasi ke sekolah-sekolah dan ke kampus-kampus untuk menjadi sebagai anggota dewan sehingga pelajar dapat merasakan langsung jika menjadi seorang legislator. Juga bazar, yang di dalam bazar tersebut mengenalkan tentang produk-produk DPR seperti risalah rapat, buku-buku kajian legislasi & APBN, majalah, *website* dan foto-foto. Kegiatan-kegiatan tersebut bertujuan agar masyarakat dapat merasakan lebih dekat dan langsung mengenai parlemen di DPR RI.

2.2.1 Sub Bagian Penerangan Humas Setjen DPR RI

Subag Penerangan merupakan salah satu sub bagian yang ada di Humas Setjen DPR RI yang sering dalam penerimaan tamu-tamu kunjungan masyarakat dari hari Senin sampai Kamis pada pukul 09.00 WIB hingga pukul 12.00 WIB. Adapun yang biasa berkunjung dari tingkatan pendidikan SD sampai universitas, masyarakat umum, juga delegasi dari luar negeri. Subag penerangan mempunyai tugas penyiapan bahan materi dan pelaksanaan penerangan kepada masyarakat mengenai DPR RI. Adapun

alur beserta kegiatan yang dilakukakan ialah:

a) Pemaparan Materi

Dalam kegiatan penerimaan kunjungan masyarakat, masyarakat pertama kali biasanya dibawa langsung ke ruangan yang dinamakan *operations room* Gedung Nusanatara DPR RI untuk kegiatan pemaparan diskusi antara masyarakat dan narasumber. Di dalam kegiatan diskusi, pertama-tama dijelaskan dahulu mengenai DPR RI, kinerja, hak, sejarah, dan lain-lain yang dijelaskan oleh narasumber sekaligus pranata Humas di DPR RI.

Sesi pertama, langsung dibuka dan dibawakan oleh moderator, moderator yang bertanggung jawab selama sesi pemaparan diskusi berlangsung. Di *operations room* sudah ada narasumber yang sekaligus pranata humas, Kasubag Penerangan, dan didampingi perwakilan dari masyarakat untuk memberikan sambutan beserta materi dan diskusi-diskusi yang dibawakan oleh narasumber atau pranata humas.

b) Tour Leader ke Musuem DPR RI

Setelah pemaparan diskusi selesai di ruang *operations room*, masyarakat langsung dibawa ke Museum DPR RI yang dibantu oleh pemandu. Selama di Museum, masyarakat akan diberikan penjelasan mengenai sejarah terbentuk mula cikal bakal DPR RI hingga dinamakan menjadi DPR RI, proses sejarah parlemen pada saat waktu itu, memperkenalkan tokoh-tokoh pimpinan DPR RI di setiap masa, memperkenalkan foto-foto dahulu, benda-benda yang dipakai selama proses rapat

pada saat dahulu, gamelan yang hanya dipakai satu tahun sekali yakni pada 29 Agustus, hingga DPR RI sekarang. Selain itu juga masyarakat diberikan kebebasan berfoto-foto selama di museum.

c) Tour Leader ke Ruang Rapat Paripurna I

Kemudian setelah masyarakat dipandu kegiatan tour leader di Museum DPR RI, masyarakat langsung dibawa ke Ruang Rapat Paripurna I yang dibantu oleh pemandu. Selama di ruangan, masyarakat langsung duduk di kursi-kursi para anggota dewan dalam pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Selama di dalam ruang rapat masyarakat diberikan penjelasan mengenai sejarah terbentuknya gedung bulat yang terbentuk seperti kura-kura yang dinamakan Gedung Nusantara, penggunaan dahulu, penggunaan pada saat ini, fungsi, jumlah seluruh kursi yang ada di dalam ruangan beserta yang menggunakan duduk di dalam kursi tersebut, pendiri gedung dan yang mendesain, pendesain patung garuda, dan pilar estetika yang terdapat di tengah depan halaman DPR RI.

2.2.2 Sub Bagian Pelayanan Informasi Publik

Sub bagian lain yang ada di Humas Setjen DPR RI yakni subag pelayanan informasi publik. Adapun Subag PIP bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan informasi publik yang sifatnya terbuka, responsif dan cekatan dalam memberikan data kepada pengaju permohonan data dari masyarakat melalui portal PPID DPR RI ppid.dpr.go.id.

Langkah-langkah yang dilakukan Humas yakni login di dalam portal sebagai *user*, kemudian cek ke PPID di bagian pemohon sebagai pemohon data yang baru saja daftar ke portal PPID DPR RI untuk diverifikasi, namun *user* harus melihat syarat wajib yang dilakukan masyarakat yang akan daftar ke portal PPID DPR RI salah satunya mempunyai tanda pengenal yang jelas dan masih berlaku. Setelah itu *user* melihat ke bagian permohonan data untuk melihat daftar permohonan data, jika ada, langsung berikan data yang diminta melalui portal ataupun email ke pemohon. Jika data sedang tidak dikuasai oleh PPID, maka *user* harus segera membuat surat Nota Dinas hingga ke Bagian Arsip dan Museum (Armus) untuk meminta data agar langsung diproses dan diberikan ke pemohon.

Selain melalui portal, Subag PIP bertanggung jawab di ruangan untuk masyarakat yang datang langsung ke ruangan Humas untuk meminta data. Syarat yang harus dilakukan oleh masyarakat sama dengan yang dilalui melalui portal. Namun pranata humas melakukan bimbingan pelatihan langsung kepada masyarakat yang datang mengenai PPID dan syarat-syarat yang dilakukan kepada pengaju pemohon. Selama pengaju berada di ruangan tim PIP harus terus melayaninya selama pemohon merasa sudah puas dan cukup dengan kebutuhan data yang dibutuhkan. Jika ternyata data sedang tidak dikuasai, pranata humas langsung membuat Nota Dinas ke Bagian Armus agar dapat langsung diproses.

2.3 Kesimpulan

Pada dasarnya DPR RI merupakan sebuah lembaga parlemen yang taraf tingkatannya sangat besar dan pusat, dari anggota dewan berjumlah 560 anggota sudah mewakili seluruh provinsi di Indonesia, juga tugas-tugas anggota dewan, fungsi DPR, semua tidak bisa bekerja dalam satu naungan, anggota dewan dan DPR pun membutuhkan pegawai di dalamnya untuk menjalani di setiap sub bagian sehingga dibentuklah stuktur organsiasi Sekretariat Jenderal yang menanungi seluruh di DPR RI dalam bentuk administrasi. Di Sekretariat Jenderal pun membutuhkan Badan Ahli dalam membantu kinerja anggota dewan, juga dibentuk Biro agar membantu DPR RI dalam internal juga eksternal. Maka dari itu banyak pemugaran-pemugaran fungsional strukturat di DPR RI agar semua dapat lebih terfokus pada bidangnya masing-masing.

Humas Setjen DPR RI salah satunya, bagian yang mengurus internal dan eksternal di DPR yang salah satu sub bagian di Biro Pemberitaan Parlemen. Humas Setjen DPR RI lebih sering dalam menangani masyarakat secara langsung baik masyarakat yang datang ke DPR RI juga Humas Setjen DPR RI yang datang ke masyarakat. Hal tersebut berguna untuk menerima masyarakat yang akan berkepentingan atau berkunjung di DPR RI juga humas yang datang ke masyarakat untuk lebih mendekatkan DPR RI kepada masyarakat. Pada intinya adalah menjaga hubungan dan membangun hubungan yang baik dan sebagai jembatan hubungan antara masyarakat dan DPR RI.